



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.15, No.2, Desember 2018

KONSTELASI POLITIK DI TAHUN ELEKTORAL

- Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018
- Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal
- Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama terhadap Preferensi Politik Warga Banten pada Pilgub 2017
- Pilkada, Peran Partai Politik, dan Konstelasi Pragmatis: Kajian atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim (2017-2018)
- Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019
- Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi
- Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia
- *Marketing* Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018

RESUME PENELITIAN

- Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung
- Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

REVIEW BUKU

- Mitos dan Realita Perempuan dalam Pemilu: Pelajaran dari Situasi Politik Amerika di Era Polarisasi Politik

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 15	No. 2	Hlm. 129-320	Jakarta, Desember 2018	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	--------------	---------------------------	-------------------

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018 Moch. Nurhasim	129–142
• Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal Lili Romli	143–160
• Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama terhadap Preferensi Politik Warga Banten pada Pilgub 2017 Agus Sutisna dan Idil Akbar	161–178
• Pilkada, Peran Partai Politik, dan Konstelasi Pragmatis: Kajian atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim (2017-2018) Firman Noor	179–196
• Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019 Ridho Imawan Hanafi	197–213
• Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi Sri Budi Eko Wardani	215–231
• Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia Sri Yanuarti	233–248
• Marketing Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018 M. Fajar Shodiq Ramadlan dan Romel Masykuri	249–265
Resume Penelitian	
• Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung Kurniawati Hastuti Dewi, dkk	267–288
• Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi Aisah Putri Budiatri, dkk	289–306
Review Buku	
• Mitos dan Realita Perempuan dalam Pemilu: Pelajaran dari Situasi Politik Amerika di Era Polarisasi Politik Mouliza K.D Sweinstani	307–317
Tentang Penulis	319–320
Pedoman Penulisan	321–325

CATATAN REDAKSI

Konstelasi politik menjelang tahun elektoral menjadikan dinamika politik baik di tingkat nasional maupun lokal menarik untuk dikaji.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan 8 artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan isu elektoral. Artikel pertama berjudul “Koalisi Nano-Nano Pilkada Serentak 2018” yang ditulis oleh Moch. Nurhasim. Artikel ini membahas tentang Pilkada serentak 2018 yang menghasilkan pola koalisi yang tidak berubah dari pilkada-pilkada sebelumnya dan bahkan menjadi pola yang berulang. Koalisi nano-nano adalah sebuah koalisi yang variatif, campuran koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religius dengan berbagai pola pertarungan yang bisa berbeda-beda. Campuran koalisi seperti itu pun tidak sama atau linear antara pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dengan pola koalisi pada Pilkada Bupati/Wakil Bupati--Walikota/Wakil Walikota. Akibatnya, intra-koalisi sendiri terjadi kompetisi yang tidak sehat. Pola koalisi yang muncul cenderung lebih pada ukuran jumlah partai dan kursi partai sebagai konsekuensi syarat mengusung calon yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

Artikel kedua ditulis oleh Lili Romli, “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal”, memperlihatkan tentang fenomena munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Para calon tunggal tersebut sebagian besar menang dalam pemilihan kepala daerah, hanya calon tunggal di Kota Makassar yang mengalami kekalahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal, yaitu pragmatisme partai politik; kegagalan kaderisasi, persyaratan sebagai calon yang semakin berat, dan “mahar politik” yang semakin mahal. Kemenangan para calon tunggal dalam pilkada tersebut bisa menghambat proses demokrasi lokal karena mekanisme check and balances tidak berjalan.

Artikel berikutnya ditulis oleh Agus Sutisna dan Idil Akbar berjudul “Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama Terhadap Preferensi Politik Warga Banten Pada Pilgub 2017” membahas mengenai kasus penistaan agama oleh Ahok sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta telah melahirkan dampak elektoral terhadap Pilgub Banten 2017 berupa terjadinya perubahan preferensi politik warga Banten. Pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarif yang diusung oleh koalisi PDIP, Nasdem dan PPP, yang semula mendapat dukungan luas dari masyarakat karena dianggap merepresentasikan semangat perubahan untuk keluar dari jeratan dinasti politik keluarga Ratu Atut Chosiyah yang korup, secara perlahan mengalami degradasi dukungan seiring dengan pemberitaan negatif seputar kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang secara terus menerus mengalami perluasan dan penajaman hingga memasuki masa tenang Pilkada.

Artikel keempat yakni “Pilkada, Peran Partai dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim Tahun 2017-2018” ditulis oleh Firman Noor. Artikel ini membahas beberapa fenomena yang mengindikasikan adanya kondisi negatif dari eksistensi partai politik terkait dengan pilkada. Fenomena ini adalah tidak hadirnya sosok kepala daerah yang merupakan pimpinan partai di daerah itu, masih kuatnya peran jaringan non-partai dalam kontestasi politik, hingga dominasi pragmatisme dalam menentukan koalisi yang kerap menyingkirkan idealisme atau ideologi partai yang secara keseluruhannya memperlihatkan kerentanan partai di Indonesia. Tulisan ini menunjukkan hal-hal yang menyebabkan itu semua. Selain itu tulisan ini menawarkan beberapa solusi agar berbagai kelemahan itu dapat teratasi dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kualitas pilkada di kemudian hari.

Artikel selanjutnya membahas tentang “Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019” yang ditulis oleh Ridho Imawan Hanafi. Artikel ini membahas mengenai kemunculan dan tantangan partai politik baru pada Pemilu 2019 dengan menelaah ideologi-program, basis dukungan, dan kepemimpinan. Partai baru muncul sebagai alternatif pilihan politik yang berbeda dari partai lama yang sudah ada. Partai politik baru ini bisa mendapatkan simpati dari pemilih yang menginginkan kebaruan dalam kepartaian. Partai-partai baru membawa corak nasionalis dengan kecenderungan program yang tidak jauh berbeda dari partai baru lain. Antara satu partai dan lainnya basis dukungan masih cair dan bisa saling memperebutkan pasar pemilih.

Sementara itu, artikel “Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi” yang ditulis oleh Sri Budi Eko Wardani yang membahas mengenai Sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan sejak Pemilu 2009 membawa perubahan dramatis pada hubungan representasi politik pasca-Orde Baru. Terjadi perubahan dalam persepsi wakil terhadap konstituen dari sekadar formalitas menjadi politis untuk kepentingan pemilu berikutnya. Persepsi terhadap konstituen memengaruhi tindakan wakil di daerah pemilihan. Tulisan ini fokus pada persepsi wakil terhadap konstituen di tingkat lokal era reformasi, dengan studi kasus Anggota DPRD Banten 2014-2019, serta menggunakan teori lingkaran konsentrik konstituensi dari Richard Fenno, dan teori representasi yang merujuk pada Hanna Pitkin.

Artikel yang ditulis oleh Sri Yanuarti berjudul “Militer dan Pemilu-pemilu di Indonesia” membahas mengenai keterlibatan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan menjadi kandidat kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun dalam pemilihan presiden atau sekedar menjadi tim pemenangan para kasus kandidat presiden. Jumlah mereka yang mencoba keberuntungannya berkarier di bidang politik dari pemilu ke pemilu semakin banyak meskipun untuk itu terkadang mereka harus mengorbankan profesinya. Tulisan ini mencoba menganalisa, bagaimana TNI menerjemahkan posisi mereka

dalam politik pada masa demokrasi, khusus pada pemilu-pemilu di Indonesia, strategi apa yang dimainkan oleh militer untuk menopang kepentingan politiknya, bagaimana dampak peran tersebut terhadap konsolidasi dan profesionalisme politik.

Artikel terakhir yakni ditulis oleh Fajar Shodiq Ramadlan dan Romel Masykuri berjudul “Marketing Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018” membahas mengenai isu agama yang menjadi salah satu instrumen strategis dalam kontestasi pemilu di Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagai bagian dalam pembentukan perilaku memilih, sentimen dan isu agama muncul dan digunakan di 7 pilkada sepanjang 2015-2018.

Selain delapan artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2017. Naskah pertama ditulis oleh Kurniawati Hastuti Dewi, “Modal, Strategi Dan Jaringan Perempuan Politisi Dalam Kandidasi Pilkada Langsung”. Tulisan ini menyoroti bagaimana pentingnya tahap kandidasi melalui jalur partai politik, sebagai pintu masuk yang harus dapat ditembus oleh politisi perempuan untuk maju dalam Pilkada langsung. Melalui analisis mendalam terhadap dua perempuan politisi di Grobogan dan Lampung Timur, buku ini menggarisbawahi pentingnya tiga hal yaitu modal berupa modal individu dan modal sosial, strategi, dan jaringan yang harus dimiliki dan mampu dimainkan oleh perempuan politisi untuk dapat dicalonkan dalam Pilkada langsung.

Naskah kedua, “Personalisasi Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi”, ditulis oleh Aisah Putri Budiatri. Tulisan ini membahas mayoritas partai politik di Indonesia pada era reformasi yang telah terjebak pada persoalan personalisasi politik. Individu elite partai menjadi image partai sekaligus orang yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan partai dalam jangka waktu yang lama. Padahal, partai politik telah memiliki mekanisme suksesi, namun satu sosok elite tetap mampu mempersonalkan partainya. Penelitian ini melihat ada beberapa aspek yang menjadi

penyebabnya, termasuk sejarah pendirian partai, kepemimpinan karismatik dan pendanaan partai. Di luar itu, presidensialisme, sistem kepartaian dan sistem pemilu menjadi faktor yang turut memfasilitasi munculnya personalisasi partai. Personalisasi partai ini harus dihindari karena dalam jangka panjang akan berdampak negatif tidak hanya kepada partai politik, tetapi juga pada upaya penegakan demokrasi di Indonesia.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Danny Hayes & Jennifer L. Lawless, “Mitos Dan Realita Perempuan Dalam Pemilu: Pelajaran Dari Situasi Politik Amerika Di Era Polarisasi Politik”. *Review* yang ditulis Mouliza K.D Sweinstani menelaah respon dari situasi politik Amerika yang berkaitan dengan eksistensi perempuan dalam kehidupan politik Amerika Serikat khususnya dalam dua pemilu sela pada tahun 2010 dan 2014. Buku ini juga memberikan cara pandang baru terhadap area politik di era terpolarisasi di Amerika Serikat dengan berusaha membongkar pemahaman konvensional mengenai bias yang harus dihadapi oleh perempuan dalam dunia politik. Selain itu buku ini juga berusaha mencari tahu apa sebetulnya yang menjadi penyebab masih adanya pemahaman bias gender dalam area politik di Amerika Serikat. Hanya saja, simpulan dari buku ini perlu digunakan secara hati-hati agar pembaca tidak melakukan generalisasi atas kondisi politik yang telah dianggap netral gender dan tidak diskriminatif seperti yang terjadi di Amerika. Pembaca

sebaiknya mengontekskan kondisi lanskap politik masing-masing agar dapat menghasilkan temuan yang mengelaborasi temuan Hayes dan Lawless. Dengan demikian, hal ini dapat memperkaya studi-studi tentang kampanye politik, media dan kandidat perempuan dalam kajian ilmu politik.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai isu politik di tahun elektoral. Selamat membaca.

Redaksi

RESUME PENELITIAN

PERSONALISASI PARTAI POLITIK DI INDONESIA ERA REFORMASI¹

PARTY PERSONALIZATION IN INDONESIA' REFORM ERA

Aisah Putri Budiatri, Syamsuddin Haris, Lili Romli, Sri Nuryanti, Moch. Nurhasim, Luky Sandra Amalia, Devi Darmawan, Ridho Imawan Hanafi

Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Email: aisahputrib@gmail.com

Diterima: 3 Oktober 2018; Direvisi: 20 Oktober 2018; Disetujui: 30 Desember 2018

Abstract

The majority of political parties in Indonesia in the reform era have been trapped in the issue of political personalization. Party elites become the image of the party and become a very influential person in party policy making for a long period of time. In fact, political parties already have a mechanism of succession, but one elite figure is still able to personalize his party. This research sees that there are causes of party personalization, including the history of party establishment, charismatic leadership and party funding. Moreover, presidentialism, party systems, and the electoral system are factors that also facilitate the emergence of party personalization. The party personalization must be avoided because in the long run it will have a negative impact not only on political parties, but also on efforts to uphold democracy in Indonesia.

Keyword: party personalization, charismatic leadership, reform era

Abstrak

Mayoritas partai politik di Indonesia pada era reformasi telah terjebak pada persoalan personalisasi politik. Individu elite partai menjadi image partai sekaligus orang yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan partai dalam jangka waktu yang lama. Padahal, partai politik telah memiliki mekanisme suksesi, namun satu sosok elite tetap mampu mempersonalkan partainya. Penelitian ini melihat ada beberapa aspek yang menjadi penyebabnya, termasuk sejarah pendirian partai, kepemimpinan karismatik dan pendanaan partai. Di luar itu, presidensialisme, sistem kepartaian dan sistem pemilu menjadi faktor yang turut memfasilitasi munculnya personalisasi partai. Personalisasi partai ini harus dihindari karena dalam jangka panjang akan berdampak negatif tidak hanya kepada partai politik, tetapi juga pada upaya penegakan demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: personalisasi partai, pemimpin karismatik, era reformasi

¹ Resume riset ini berdasarkan pada laporan penelitian Tim Sistem Kepartaian, Pemilu dan Perwakilan, Pusat Penelitian Politik, LIPI, yang diselenggarakan pada tahun 2017 berjudul “Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi.” Substansi pokok di dalam tulisan ini sudah diterbitkan dalam Aisah Putri Budiatri (ed), *Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

Pendahuluan

Membicarakan tentang kepemimpinan partai, personalisasi politik menjadi salah satu isu utama yang saat ini seringkali dikaji. Personalisasi politik pada partai atau diistilahkan juga menjadi personalisasi partai politik (parpol) dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana individu elite memiliki posisi lebih penting dibandingkan organisasi partainya atau identitas kolektif lainnya.² Elite menjadi sangat berpengaruh dalam segala proses pembuatan kebijakan partai, bahkan ia juga menjadi image dan/atau identitas partai.³ Hal ini menjadikan elite tersebut mampu menjadi penguasa partai dalam periode waktu yang lama.⁴

Pada era reformasi, personalisasi partai politik menjadi hal yang kerap muncul dalam dinamika perpolitikan di Indonesia. Mayoritas partai politik besar yang memiliki kursi di parlemen saat ini memiliki seorang elite yang menduduki posisi-posisi penting dalam struktur partai, serta menjadi sosok yang dicalonkan dalam pemilihan presiden berulang kali. Tabel 1 memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai partai-partai politik di era reformasi yang paling memperlihatkan gejala personalisasi politik.⁵

² Lauri Karvonen, *The Personalization of Politics: A Study of Parliamentary Democracies* (Colchester, UK: ECPR Press, 2010), hlm 4.

³ Diadaptasi ulang dari berbagai definisi yang disampaikan oleh Karvonen (2010), Balmas (2014), Langer (2007), Mughan (2000), Aarts (2011), Blais (2011), dan lainnya. Penjelasan lebih lengkap dari definisi 'personalisasi partai politik' akan dipaparkan lebih dalam pada bagian kerangka pemikiran. William Cross dan Jean-Benoit Pilet, "Uncovering the Politics of Party Leadership" dalam *The Politics of Party Leadership: A Cross National Perspective*, ed. William Cross dan Jean-Benoit Pilet (Oxford, UK: Oxford University Press, 2015), hlm. 23-24.

⁴ Giulia Sandri, Antonella Seddone, dan Fulvio Venturino, "Understanding Leadership Profile Renewal," dalam *The Politics of Party Leadership: A Cross National Perspective*, ed. William Cross dan Jean-Benoit Pilet (Oxford, UK: Oxford University Press, 2015), hlm. 146.

⁵ Partai-partai politik yang dicantumkan di dalam Tabel 1 adalah partai-partai besar di Indonesia yang sampai saat ini memiliki kursi di parlemen (DPR RI Periode 2014-2019). Partai-partai ini memiliki seorang tokoh sentral yang menjadi identitas melekat pada partai, serta berpengaruh dan menempati posisi tertinggi (kuat) di dalam partai selama lebih dari lima tahun berturut-turut. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan ada partai politik lain yang tidak tercantum di dalam tabel 1 juga pernah dan/atau sedang menghadapi persoalan personalisasi politik.

Pada tabel 1 di bawah, tergambarakan bagaimana setidaknya ada tujuh partai yang dinilai menggejala personalisasi politik. Setiap partai tersebut memiliki seorang individu yang identik dan berpengaruh kuat terhadap partai, misalnya sosok Megawati di PDIP dan SBY dalam Partai Demokrat. Umumnya, selain menjadi pemimpin partai, sosok elite tersebut adalah para pendiri partai politik.⁶ Tokoh sentral menduduki posisi-posisi puncak kepengurusan, termasuk ketua umum, ketua dewan kehormatan atau jabatan lain yang setara/lebih tinggi, selama lebih dari lima tahun. Megawati, bahkan, telah menjadi Ketua Umum PDIP sejak berdiri hingga hari ini, atau sekitar dua dekade lamanya.

Adanya tujuh partai yang menghadapi personalisasi politik merupakan hal yang signifikan, mengingat saat ini hanya ada sepuluh partai politik yang memiliki kursi di parlemen nasional dan mampu berkompetisi dalam perpolitikan nasional di Indonesia. Sepuluh nama partai itu diantaranya adalah PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, PKB, PAN, PKS, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerindra, Partai Hanura, dan Partai Nasdem.⁷ Dalam hal ini, artinya personalisasi politik adalah hal yang menjadi fenomena umum dan menggejala pada mayoritas parpol di Indonesia. Walaupun begitu, perlu dipahami bahwa derajat personalisasi ini berbeda-beda antar partai dan antar masa.

⁶ Semua individu elite yang disebutkan di dalam tabel 1 adalah pendiri partai, kecuali Susilo Bambang Yudhoyono yang bukan merupakan pendiri melainkan penggagas Partai Demokrat. SBY yang memiliki inisiatif untuk mendirikan Partai Demokrat setelah kekalahannya dalam pemilihan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia oleh Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001. Namun, SBY tidak termasuk ke dalam Tim Pendiri Partai Demokrat yang disebut Tim 9. Lihat: "Sejarah Pembentukan dan Berdirinya Partai Demokrat," 15 Februari 2017, <http://www.demokrat.or.id/sejarah/>, diakses pada 15 Februari 2017.

⁷ Dari sepuluh partai, hanya satu partai yang sempat berganti nama dan berdiri menjadi partai baru, yakni Partai Keadilan (PK) -peserta Pemilu 1999- yang berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) -peserta Pemilu 2004, 2009 dan 2014-. Partai Keadilan harus mengubah namanya menjadi Parti Keadilan Sejahtera agar dapat mengikuti kembali Pemilu pada tahun 2004, karena sesuai dengan UU Pemilu No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, maka hanya partai yang memenuhi minimum 2% dari jumlah kursi di DPR yang dapat mengikuti kembali pemilu selanjutnya. Saat itu PK hanya memiliki 1,51% dari total kursi di DPR. Dalam Ganjar Razuni, *Sebuah Koreksi Konstruksi Reformasi Hasil Pemilu 1999* (Jakarta: Labsopol FISIP UNAS, 2001), hlm 123.

Tabel 1. Peta Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

No.	Partai Politik	Tokoh Partai Politik	Posisi di dalam Partai	Posisi Pencalonan Pilpres
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Megawati Sukarnoputri	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiri PDIP • Ketua Umum Partai (1999-sekarang) 	<ul style="list-style-type: none"> • Capres Pilpres 1999, 2004, 2009 • Cawapres 1999 (terpilih)
2.	Partai Demokrat	Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)	<ul style="list-style-type: none"> • Penggagas Partai • Ketua Umum Partai (30 Maret 2013-12 Mei 2015) • Ketua Umum Partai (12 Mei 2015-12 Mei 2020) 	<ul style="list-style-type: none"> • Capres Pilpres 2004 dan 2009 (terpilih dua periode)
3.	Partai Amanat Nasional (PAN)	Amien Rais	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiri PAN (1998) • Ketua Umum Partai (1998-2005) • Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (2005-2015) • Ketua Dewan Kehormatan Partai (2015-2020) 	<ul style="list-style-type: none"> • Capres Pilpres 2004
4.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Abdurrahman Wahid (Gus Dur)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiri PKB(1998) • Ketua Dewan Syuro (2000-2009) 	<ul style="list-style-type: none"> • Capres Pilpres 1999 (terpilih)
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Prabowo Subianto	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiri Partai Gerindra (2008) • Ketua Dewan Pembina (2008-sekarang) 	<ul style="list-style-type: none"> • Cawapres Pilpres 2009 • Capres Pilpres 2014
6.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Wiranto	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiri Partai Hanura (2006) • Ketua Umum (2006-2016) 	<ul style="list-style-type: none"> • Cawapres Pilpres 2009 • Bakal Capres 2013 (tidak mengikuti Pilpres 2014)
7.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Surya Paloh	<ul style="list-style-type: none"> • Pendiri Partai Nasdem (2011) • Ketua Majelis Tinggi Partai (2011-2013) • Ketua Umum Partai (2013-sekarang) 	-

Sumber: diolah dari berbagai sumber.

Misalnya, PKB di bawah kepemimpinan Gus Dur lebih kuat kadar personalisasinya dibandingkan saat ini. Sementara itu, tingkat personalisasi PKB saat ini pun dapat dikatakan lebih rendah dibandingkan dengan PDIP yang terpersonalisasikan oleh Megawati sejak partai didirikan hingga saat ini.

Personalisasi partai tidak seharusnya terjadi pada era reformasi ini mengingat upaya reinstitusionalisasi partai, salah satunya melalui pergantian kepengurusan partai, menjadi salah satu agenda penting reformasi. UU Partai Politik, sejak diterbitkannya UU Partai No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahkan sudah mengatur

secara khusus tentang pergantian kepengurusan partai, walaupun mekanisme lebih detailnya diserahkan secara internal kepada masing-masing partai.⁸ Lebih dari itu, secara umum, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dari tujuh partai yang menggejala personalisasi juga telah mengatur perihal pergantian kepemimpinan partai.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 23.

Tabel 2. Mekanisme Suksesi Kepemimpinan 7 Partai Politik di Indonesia

Partai	Bentuk Pertemuan	Periode Suksesi	Mekanisme Suksesi	Ketentuan lain
PDIP	Kongres	Setiap 5 tahun	Mufakat, aklamasi, & voting	Kuorum 2/3 peserta
Demokrat	Kongres	Setiap 5 tahun	Mufakat & voting	Kuorum 50%+1
PAN	Kongres	Setiap 5 tahun	Mufakat, aklamasi, & voting	Kuorum 50%+1
PKB	Muktamar	Setiap 5 tahun	Mufakat & voting	Kuorum 50%+1
Hanura	Munas	Setiap 5 tahun	Mufakat, aklamasi, & voting	Kuorum 50%+1
Gerindra	Kongres	Setiap 5 tahun	Mufakat & voting	Kuorum 50%+1
Nasdem	Rapat Terbatas dalam kongres	Setiap 5 tahun	Keputusan oleh Majelis Nasional	-

Sumber: diolah dari AD/ART PDIP, Partai Demokrat, PAN, PKB, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem.

Pada tabel 2 terlihat bahwa partai telah memiliki mekanisme pergantian kepemimpinan partai yang dibuat secara reguler setiap lima tahun sekali. Dengan demikian, partai sesungguhnya memiliki kesempatan untuk mengubah pimpinan partai dan mampu mencegah partainya terpersonalkan oleh satu individu elite saja. Namun, mengapa mereka tetap terjebak pada persoalan personalisasi partai? Pertanyaan ini penting dan menarik untuk dikaji karena belum ada kajian akademik sebelumnya yang mampu menjawabnya secara komprehensif. Kalaupun ada, maka kajiannya hanya berupa tulisan pendek atau bagian kecil dari sebuah tulisan utuh.⁹

Melihat adanya kekosongan kajian tersebut, maka Tim Pemilu P2P LIPI mengkaji persoalan personalisasi partai politik secara komprehensif dengan membandingkan beberapa partai

sekaligus mulai sejak tahun 1999 hingga saat ini. Adapun kajian ini berfokus pada dua pertanyaan penelitian, yakni: (1) Mengapa kepemimpinan partai politik di Indonesia cenderung terperangkap kedalam fenomena personalisasi politik? Apa saja faktor yang menyebabkan munculnya fenomena personalisasi politik? serta (2) Bagaimana dampak personalisasi politik terhadap pelembagaan partai politik dan sistem kepartaian di Indonesia?

Personalisasi Politik pada Partai, Partai Personal dan Partai Personalistik

Personalisasi politik diartikan oleh Karvonen sebagai sebuah situasi dimana aktor individu politik menjadi lebih utama dan penting perannya dibandingkan partai politik atau identitas kolektif lainnya. Aktor politik ini dapat dimaknai secara spesifik sebagai pemimpin politik/partai atau politisi pada umumnya. Dalam konteks personalisasi partai, Renwick dan Pilet menyatakan bahwa aktor dalam personalisasi adalah pimpinan parpol.¹⁰

Untuk menyatakan apakah sebuah partai mengalami personalisasi politik atau tidak, maka dapat dilihat tanda-tandanya dari beberapa karakteristik personalisasi partai. Karakteristik pertama adalah lekatnya identitas

⁹ Syamsuddin Haris, "Partai dan Personalisasi Kekuasaan," *Harian Kompas*, (Jakarta), 31 Maret, 2005; A. Rahman Tolleng, "Selamat Datang Personalisasi Politik," *Harian Tempo*, (Jakarta), 24 November 2003; Donny Gahral Adian, "Personalisasi Politik," *Harian Kompas*, (Jakarta), 27 September 2012; Halili Hasan, "Partai Politik, Ornamen Demokrasi," *Jawa Pos*, (Jakarta), 19 April 2016; Eko Prasajo, "Pemilihan Presiden, Personalisasi Politik?" *Harian Kompas*, (Jakarta), 20 April 2004; Eko Prasajo, *Demokrasi di Negeri Mimpi* (Depok: FISIP UI, 2005); Ikhsan Ahmad, *Pilar Demokrasi Kelima: Politik Uang: Realitas Konstruksi Politik Uang di Kota Serang, Banten* (Yogyakarta: Deepublish, 2015); Eep Saefulloh Fatah, *Mencintai Indonesia dengan Amal*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2004); M. Nurhasim, "Kegagalan Modernisasi Partai Politik di Era Reformasi," *Jurnal Penelitian Politik*, 10, no. 1 (2013): 17-28; Hanta Yudha, *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010).

¹⁰ Untuk mengklarifikasi ini, Renwick dan Pilet mengacu pada berbagai kajian akademik yang ditulis oleh Karvonen, Clarke, Kornberg, Scotto, Aarts, Bittner, Costa Lobo dan Curtice. Lihat: Alan Renwick dan Jean-Benoit Pilet, *Faces on the Ballot: The Personalization of Electoral Systems in Europe* (Oxford, UK: Oxford University Press, 2016), hlm. 4-5.

atau *image* partai politik pada pemimpin partai.¹¹ Karakteristik kedua yakni ditempatkannya individu elite sebagai penarik dukungan dan suara bagi partai, khususnya ketika pemilu. Tokoh sentral dalam hal ini menggantikan pengaruh ideologi dan identifikasi partai lain yang berfungsi untuk menarik dukungan konstituen partai.¹² Karakteristik yang ketiga adalah kuatnya pengaruh tokoh sentral terhadap partai dalam jangka waktu yang lama, bahkan selama individu tersebut itu hidup.¹³

Oleh Mauro Calise, personalisasi ini menjadikan partai kemudian berwujud sebagai partai personal, dimana struktur dasar partai yang seharusnya bersifat legal rasional dan kolektif berubah menjadi suatu hal terkait kepemimpinan individu yang karismatik dan hubungan patrimonial.¹⁴ Selain partai personal, Gunther dan Diamond menggunakan istilah lain yang menunjukkan kondisi partai yang terpersonalisasi, yakni partai personalistik. Partai personalistik ini menempatkan partai sebagai kendaraan politik bagi kepentingan individu pemimpinnya untuk mendapatkan kekuasaan dan memenangkan pemilu.¹⁵

Faktor Penyebab Personalisasi Politik pada Partai

Menurut Rhodes dan Hart, personalisasi partai bukan disebabkan oleh hanya satu hal tetapi sebagai bentuk dari akumulasi beberapa faktor. Hal pertama adalah tingginya loyalitas konstituen kepada individu pemimpin partai politik. Yang kedua adalah meningkatnya peran dan pengaruh individu pemimpin tersebut terhadap partai akibat aktivitasnya yang tinggi dalam melakukan

mediasi dan lobi atas nama partainya.¹⁶ Selain itu, Blondel juga menyatakan bahwa kharisma yang kuat dari seorang tokoh adalah salah satu alasan mengapa personalisasi partai dapat terjadi.¹⁷ Tak hanya itu, kultur patronase, yaitu relasi dua pihak dimana patron, yang berstatus sosial-ekonomi lebih tinggi, mampu mempengaruhi klien, yang berstatus lebih rendah dengan timbal balik sumber daya tertentu, merupakan hal yang dapat memunculkan kondisi personalisasi partai.¹⁸

Sistem politik, kepartaian dan pemilu juga menjadi faktor lain yang dapat memfasilitasi terjadinya personalisasi politik pada partai. Samuels menyatakan bahwa presidensialisme adalah sistem politik yang mendorong terjadinya personalisasi partai, karena menjadikan individu elite sebagai tumpuan harapan publik dan bukan pada institusi partai. Situasi ini berbeda dengan sistem parlementer yang menekankan pada pentingnya peran partai dalam berbagai aspek kehidupan politik.¹⁹ Firman Noor menambahkan bahwa presidensialisme ini semakin buruk bagi personalisasi partai ketika dikombinasikan dengan sistem pemilu langsung.²⁰ Dalam mekanisme pemilu langsung, individu capres dipilih langsung oleh publik sehingga tidak semata-mata bergantung terhadap partai politik. Karenanya, posisi individu capres menjadi lebih sentral dibandingkan partai dalam pemilu presiden langsung.

Sistem kepartaian menjadi faktor lain yang juga berpengaruh. Berdasar pada apa yang berlangsung di Indonesia pada era reformasi,

¹¹ Jean-Benoit Pilet dan William Cross, "Uncovering The Politics of Party Leadership." Dalam *The Politics of Party Leadership: A Cross National Perspective*, ed. oleh William Cross dan Jean-Benoit Pilet (Oxford, UK: Oxford University Press, 2015), hlm. 20-34.

¹² Sandri, Seddone, dan Venturino, "Understanding Leadership," hlm. 149.

¹³ Sandri, Seddone, dan Venturino, "Understanding Leadership," hlm. 146.

¹⁴ Mauro Calise, "The Personal Party: An Analytical Framework," dalam *Scienze Politiche*, 45, no.3, (2015): 303-306.

¹⁵ Richard Gunther dan Larry Diamond, "Species of Political Parties," dalam *Party Politics*, 9, no. 2 (2003): 187-188.

¹⁶ R. A. W. Rhodes dan Paul T Hart, *The Oxford Handbook of Political Leadership* (Oxford, UK: Oxford University Press, 2014), hlm. 369-340.

¹⁷ Jean Blondel dan Jean-Louis Thiebault, *Political Leadership, Parties and Citizens: The Personalisation of Leadership* (New York: Routledge, 2010), hlm. 30.

¹⁸ James Scott, "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia," *The American Political Science Review* 66, no. 1, (1972), hlm.92.

¹⁹ David J. Samuels, "Presidentialized Parties: The Separation of Powers and Party Organization and Behavior," *Comparative Political Studies* 35, no. 4, (2002), hlm. 462-463, 471, 480-481.

²⁰ Firman Noor, "Menimbang Masa Depan Sistem Presidensial di Indonesia Problematika Demokrasi dan Kebutuhan Perbaikan Sistemik," dalam *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, ed. Moch. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 56.

Hanta Yudha melihat sistem multipartai berkontribusi dalam melahirkan banyak figur yang kemudian berpengaruh kuat pada partai. Situasi ini berlangsung karena konvergensi politik akibat masifnya perpecahan partai dan kelahiran partai baru. Secara sederhana, sistem multipartai dianggap memberikan peluang yang besar bagi individu elite untuk mendirikan partai baru dan menguasainya.²¹ Pendirian partai kemudian menjadi bersifat top-down, karena didasarkan pada kehendak elite partai bukan karena gagasan kelompok di dalam masyarakat.²²

Peluang pendirian partai baru yang terbuka dalam sistem multi partai membuat personalisasi partai semakin menjadi-jadi diakibatkan juga oleh biaya pembentukan partai saat ini yang sangat mahal, dimana partai harus memiliki kepengurusan dari tingkat nasional sampai daerah. Pihak yang sangat mungkin mendirikan partai adalah individu-individu elite yang memiliki sumber daya material dan finansial. Faktor sumber pendanaan ekonomi menjadi hal yang akan memengaruhi terbentuknya personalisasi politik pada partai karena si pemilik modal lah yang kemudian menjadi tokoh sentral partai dan menjadi sangat berpengaruh terhadap partai. Mauro Calise juga menjelaskan bahwa aspek finansial ini menjadi salah satu sumber terbentuknya kultur patronase di dalam partai, yang lambat laun mendorong terbentuknya partai personal.²³

Dampak Personalisasi Partai Politik

Berangkat dari teori pendahulu, personalisasi partai dapat berdampak pada partai politik, sistem kepartaian dan politik kenegaraan. Menurut Zheng Yongnian, ada dua dampak yang dapat ditimbulkan oleh personalisasi partai. Pertama,

²¹ Sejak reformasi berlangsung tahun 1999, Indonesia menerapkan sistem multipartai ekstrim, atau secara teori disebut oleh Sartori sebagai sistem pluralisme ekstrim, dimana sistem partai memiliki lebih dari lima partai politik. Tidak ada pembatasan jumlah pendirian partai politik di Indonesia pada era. Hal ini berbeda dengan Orde Baru yang membatasi jumlah sistem multipartainya hanya tiga partai. Lihat: Giovanni Sartori, *Parties and Party Systems* (Colchester, UK: The European Consortium for Political Research (ECPR), 2005), hlm. 111.

²² Chris Manning dan Peter Van Diermen, *Indonesia di Tengah Transisi* (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 314.

²³ Mauro Calise, (2015), hlm.305.

kepemimpinan partai yang kuat akan berdampak pada kondisi partai politik yang lemah karena segala kegiatan partai ditujukan bukan untuk kepentingan publik, melainkan kepentingan elite pimpinannya. Kedua, besarnya kekuasaan elite atas partai akan berdampak pada lemahnya peran dan posisi negara. Hal ini karena partai politik memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan negara, sehingga personalisasi partai pada akhirnya akan berakibat pada melemahnya fungsi negara untuk melindungi rakyatnya. Sebaliknya, negara justru akan dimanfaatkan untuk mengelola kekuasaan satu orang elite saja.²⁴

Berkaca dari pengalaman di tiga Negara Skandinavia, termasuk Denmark, Norwegia, dan Swedia di akhir abad XX., Blondel menilai bahwa personalisasi partai akan berakibat pada melemahnya sistem partai politik. Hal ini karena partai kemudian akan menghadapi persoalan persoalan patronase dan klientelistik.²⁵ Personalisasi parpol ini juga bertolak belakang dengan upaya melembagakan sistem kepartaian karena manajemen partai cenderung dijalankan secara tidak demokratis dan independen terhadap individu elite. Padahal, sesuai teori sistem kepartaian Mainwaring dan Scully, sistem kepartaian yang terlembaga mensyaratkan partai dikelola secara profesional, bergantung pada sistem demokratis yang ajeg dan tidak dikuasai oleh hanya elitnya.²⁶

Dinamika Kepemimpinan Partai Politik di Indonesia: Perspektif Sejarah

Membicarakan persoalan kepemimpinan partai politik di Indonesia sebelum era reformasi dapat ditelaah dari dua periode waktu berbeda, yakni Orde Lama dan Baru. Ada perbedaan pola yang mencolok dari dua kurun waktu tersebut. Pada masa Orde Lama, ideologi memegang peranan yang penting di dalam

²⁴ Zheng Yongnian, *The Chinese Communist Party as Organizational Emperor* (Oxon OX: Routledge, 2010), hlm. 89-90.

²⁵ Blondel dan Thiebault, *Political Leadership*, hlm. 33.

²⁶ S. Mainwaring & T. R. Scully, *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America* (Stanford, CA: Stanford University Press, 1995), hlm. 4.

masyarakat dan partai politik. Partai politik saat itu menggunakan ideologi sebagai daya tarik untuk mendapatkan dukungan konstituen. Karenanya, mereka mengimplementasikan ideologi ke dalam kebijakan pemerintahannya. Sementara di era pemerintahan Orde Baru, penguasa memberlakukan sistem kepartaian hegemoni. Artinya, pemerintah yang berkuasa menggunakan kekuatan politiknya untuk melemahkan partai melalui berbagai kebijakan. Misalnya, rezim menggunakan mesin birokrasi untuk memenangkan partai tertentu dan mengatur perolehan suara dalam pemilu. Akibatnya, bisa dipastikan bahwa Golkar, sebagai sumber kekuatan politik Suharto saat itu, selalu mampu mengungguli PPP dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Jika dirunut lebih jauh sebelum masa orde lama, personal pemimpin partai sangat menonjol hingga menjadikan partai bergantung pada pemimpinnya. Namun, hal ini tidak menjadikan partai sampai terpersonalkan karena besarnya tekanan kolonial kepada pemimpin partai menjadikan mereka fokus pada perjuangannya pada cita-cita membebaskan Indonesia dari penjajahan. Setelah merdeka, pemimpin partai masih berperan sangat kuat terhadap partai, namun di sisi lain, ideologi juga memegang posisi yang kuat di dalam partai. Ideologi yang menguat setelah sempat dihambat perkembangannya oleh pemerintah kolonial menjadi kunci bagi partai untuk menarik dukungan konstituen. Karenanya, partai pada era ini (hingga tahun 1965) terbelah dalam garis ideologi yang jelas. Misalnya, Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang berbasis sosialisme, Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan komunisme, dan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berpijak pada nasionalisme merupakan partai yang berada dalam kubu partai-partai nasionalis. Sementara itu, di kubu partai berbasis agama ada Partai Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU).

Meskipun berbasis ideologi yang kuat, partai politik era Orde Lama terjankit kultur patronase, dimana pimpinan partai menjadi patron atas anggota dan simpatisan partai. Pimpinan partai tidak hanya sebagai pendiri partai, tapi juga sebagai pengembang ideologi dan penentu arah kebijakan partai. Hal ini hampir

terjadi di semua partai. Meskipun demikian, pada PSII dan Perti ada kekhasan lain dalam dinamika kepemimpinannya. Kedua partai ini lebih paternalistik karena posisi strategis partai tak hanya dikuasai satu elite pimpinan saja tetapi oleh anggota partai yang memiliki hubungan keluarga dengan pimpinan partai. Dalam kasus PSII, kepemimpinan partai juga dipengaruhi oleh wibawa tradisional. Wibawa tradisional ini, jika dikaitkan dengan konsep Ansell dan Fish²⁷, dapat dikategorikan ke dalam tipe pemimpin karismatik. Pemimpin karismatik juga mewarnai kepemimpinan Sukarno di PNI.

Pascaberakhirnya Orde Lama, pengaruh ideologi terhadap partai semakin melemah akibat adanya kebijakan fusi dan implementasi undang-undang yang bertujuan untuk memperkuat mesin politik penguasa, Golkar, pada era Orde Baru. Partai politik juga dipaksa mengganti ideologinya dengan ideologi Pancasila. Sementara itu, Golkar yang dinyatakan oleh Pemerintah Soeharto sebagai bukan partai politik, kemudian dijadikan sebagai mesin politik yang selalu mengalahkan dua partai lainnya dalam pemilu. Golkar bersama-sama dengan militer dan birokrasi menjadi sumber kekuasaan Soeharto. Sistem partai hegemoni ini tidak mendukung terjadinya personalisasi partai politik, kecuali partai politik penguasa.

Presidensialisme, Sistem Pemilu, Sistem Kepartaian dan Personalisasi Partai

Secara teoretis, pilihan sistem politik akan menentukan berlangsung tidaknya personalisasi politik. Dalam konteks relasi antara sistem presidensial dengan personalisasi partai, ada tiga karakteristik pada presidensialisme yang dinilai mampu mendorong terbentuknya personalisasi. Pertama, presidensialisme menitikberatkan kekuatan politik pada individu bukan institusi politik, termasuk partai.²⁸ Kedua, sistem

²⁷ Christopher K. Ansell dan M. Steven Fish, "The Art of Being Indispensable Noncharismatic Personalism in Contemporary Political Parties," *Comparative Political Studies*, vol. 32, no. 3, (1999): 287-289.

²⁸ Juan J. Linz, *Democracy: Presidential or Parliamentary: Does it Make a Difference*, makalah tidak dipublikasikan, 1985, hlm. 4; Croissant dan Merkel, "Political Party Formation," 6; Juan J. Linz, "The Perils of Presidentialism," *Journal of Democracy*, 1, no. 1, (1990), hlm. 69.

presidensial menekankan pada pentingnya proses pemilihan presiden, bukan pemilihan anggota legislatif; sehingga, partai pada akhirnya berfokus pada memenangkan calon presidennya agar mendapatkan sumber daya dan dukungan politik yang kuat.²⁹ Ketiga, presidensialisme, terutama yang dikombinasikan dengan pemilihan langsung, mendorong munculnya sosok populer dan kharismatik yang menarik perhatian publik untuk memenangkan kekuasaan politik dalam pemilu.³⁰ Ketiga hal ini menjadikan peluang partai menjadi personal begitu kuat akibat difasilitasi oleh penerapan sistem presidensial.

Tiga karakteristik presidensialisme yang mendorong personalisasi terjadi secara nyata di Indonesia. Pada masa sebelum era reformasi, presidensialisme menjadi faktor kuat mengapa Soekarno dan Soeharto mampu mempersonalisasikan dunia politik Indonesia di masa lalu. Presiden dapat bekerja secara otonom dan independen tanpa harus bergantung dengan partai atau parlemen dalam membuat kebijakan dan keputusan politiknya. Kasus penyederhanaan partai oleh Soekarno, yakni melalui Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian, dan oleh Soeharto melalui kebijakan fusi partainya pada tahun 1975, memperlihatkan bagaimana personalisasi dunia politik di Indonesia pada saat itu.

Personalisasi yang berlangsung pada masa sebelum era reformasi menjangkit kehidupan politik dalam kerangka yang luas, sementara pada masa kini, personalisasi secara khusus menghingapi partai-partai politik. Artinya, saat ini personalisasi berlangsung di dalam tubuh partai. Hal ini karena pascareformasi, peran partai politik menguat dan dikombinasikan dengan sistem presidensial yang juga diperkuat. Partai politik menjadi satu-satunya kendaraan politik yang terlegitimasi, dimana semua calon presiden wajib diusung oleh partai. Akibatnya, personalisasi kemudian tidak hanya dapat dilakukan oleh presiden yang berkuasa, tetapi oleh banyak individu elite yang mau menjadi presiden. Personalisasi partai kerap dilakukan

oleh individu elite agar mereka kemudian dicalonkan oleh partai sebagai kandidat presiden.

Pada era reformasi ini, ada dua bentuk pola personalisasi partai yang terbentuk akibat adanya dua bentuk pemilihan presiden yang berlaku, yakni pemilihan tidak langsung dan langsung. Pola ini terbagi karena model pemilihan presiden mau tak mau akan berpengaruh pada strategi partai memenangkan kandidatnya dalam pemilu. Pada Pilpres 1999, proses pemilihan secara tidak langsung mendorong partai membuat koalisi partai anggota parlemen untuk mampu memenangkan pilpres. Dampaknya, tokoh kuat yang muncul dalam politik Indonesia saat itu tidak hanya calon presiden saja tetapi juga aktor yang terlibat di balik pembuatan koalisi partai, yakni Megawati, Gus Dur dan Amien Rais.

Personalisasi menjadi semakin menguat, khususnya personalisasi partai, pascaditerapkannya pilpres langsung. Karena pemilihan ditentukan oleh rakyat, maka setiap elite politik merasa memiliki peluang menjadi presiden. Akibatnya, setiap partai terdorong untuk mencalonkan tokoh sentralnya yang populer dan berkarisma dalam pemilu (lihat tabel 1). Mereka tidak lagi melakukan rekrutmen dan seleksi kandidat karena berasumsi dengan popularitas tokoh sentralnya dan kerja keras partai akan dapat memenangkan pemilu.³¹ Pemberlakuan pilpres langsung juga berdampak pada munculnya fenomena pembentukan partai baru oleh elite partai yang populer dan berfinansial kuat dengan tujuan agar partainya kemudian menjadikan ia sebagai kandidat presiden. Hal ini dicontohkan pada kasus digagasnya Partai Demokrat oleh SBY yang kemudian sukses menjadikannya presiden dua periode berturut-turut. Selain SBY dan demokrat, ada juga Partai Gerindra yang didirikan oleh Prabowo, Partai Hanura oleh Wiranto, dan Partai Nasdem oleh Surya Paloh. Semua tokoh sentral tersebut digadang-gadang menjadi capres, meskipun pada akhirnya hanya SBY dan Prabowo yang sungguh-sungguh pernah berkompetisi di dalam Pilpres (lihat tabel 1).

Selain terkait dengan sistem pemilu langsung atau tidak langsung, beberapa aturan terkait

²⁹ Croissant dan Merkel, "Political Party Formation...", hlm. 6; Kitschelt, "Formation of Party...", hlm. 452.

³⁰ Croissant dan Merkel, "Political Party Formation...", hlm. 10.

³¹ Hanya pencalonan Jokowi pada Pilpres 2014 yang dapat dikatakan sebagai pengecualian, karena ia bukan tokoh sentral PDIP, partai yang mencalonkannya.

dengan sistem pemilu juga mempengaruhi kemunculan personalisasi partai. Persoalan luasnya daerah pemilihan, model pencalonan, model pemungutan suara dan ketentuan mengenai calon terpilih telah membuat partai mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya pragmatis. Partai menjadi pragmatis karena seperangkat mekanisme di dalam sistem pemilu mendorong partai untuk melihat kapasitas modal, popularitas atau kharisma dalam penentuan calon di dalam pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun untuk pemilihan presiden dan kepala daerah. Hal ini secara langsung maupun tidak akan mendorong partai terjebak dalam personalisasi politik. Misalnya, penerapan formula daerah berwakil banyak (*multi member constituency*) yang dikombinasikan dengan penetapan daerah pemilihan (dapil) yang luas menjadikan perebutan kursi di DPR RI menjadi sulit dan mahal. Para caleg partai harus mampu menjangkau wilayah luas, sampai beberapa kabupaten/kota, bahkan bisa saja satu wilayah provinsi. Padahal, semakin luas dapil berarti semakin mahal biaya kampanye. Pada akhirnya, situasi ini menjadikan partai semakin bergantung pada individu elite yang secara finansial mampu membiayai partai.

Selain sistem pemilu, sistem kepartaian menjadi faktor lain yang turut berkontribusi mendorong kecenderungan partai politik pada era reformasi menjadi partai personal. Pemberlakuan sistem multipartai yang membuka peluang pendirian partai secara bebas turut memfasilitasi terbentuknya personalisasi partai. Hal ini karena semakin banyaknya partai yang berkuasa akan mendorong semakin sulitnya kompetisi antarpolitical. Agar menang dalam kontestasi pemilu, maka partai membutuhkan *vote getter* dan kemampuan finansial yang kuat. Karenanya, partai mengambil jalan pintas dengan mengandalkan elite yang berkharisma sekaligus mampu membiayai partai. Individu elite tersebut sangat mungkin kemudian membentuk dirinya menjadi patron di dalam partai, sehingga anggota-anggota partai pun menjadi bergantung padanya. Akibatnya, partai pada akhirnya menjadi lebih berbasis pada individu elite dibandingkan ideologi ataupun program partai. Dengan situasi ini, personalisasi partai menjadi tak terhindarkan.

Sistem multipartai juga mengandung persoalan lain bagi personalisasi partai yakni pemberian peluang bagi elite beruang untuk mendirikan partai baru. Dalam hal ini, partai tidak lagi didirikan berdasarkan aspek ideologis dan untuk menyalurkan aspirasi kelompok masyarakat luas, tetapi untuk kepentingan sempit elite politik. Partai, misalnya, didirikan hanya sebagai kendaraan politik bagi individu elite untuk mencalonkan diri di dalam pilpres. Di satu sisi, hal ini bisa memunculkan tokoh-tokoh alternatif baru dalam politik Indonesia, tetapi di sisi lain akan berpotensi memperkuat personalisasi partai.

Sistem kepartaian yang belum terlembaga di Indonesia saat ini juga mendorong lahirnya personalisasi. Tidak terlembagannya sistem kepartaian akibat sistem manajemen partai yang tidak bersifat ajeg dan segala keputusan masih bersifat sentralistik berkontribusi pada lahirnya personalisasi partai politik. Sistem kepartaian yang belum terlembaga ini juga memberikan peluang bagi individu elite untuk memainkan pengaruhnya secara luas terhadap partai dan mampu membuat kebijakan partai atas dasar kepentingan pribadinya. Partai akhirnya tidak lagi berbasis pada program, tetapi bersandar pada faktor ketokohan.

Partai Islam dan Personalisasi di Era Reformasi

Partai Islam tak luput dari persoalan personalisasi partai politik. Beberapa figur populer dan berpengaruh muncul dalam narasi kepemimpinan partai. Figur ini, di satu sisi membantu partai mendapatkan dukungan suara, namun di sisi lain menjadikan partai mengalami ketergantungan pada ketokohan mereka. Ada dua partai Islam yang memperlihatkan atau setidaknya pernah memperlihatkan adanya fenomena personalisasi partai, yakni PKB yang lekat identitasnya dengan Gus Dur dan PAN yang melekat dengan Amien Rais. Personalisasi pada kedua partai ini dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya: relasi historis pendirian partai, karisma, patronase, serta institusionalisasi yang rapuh.

Faktor sejarah pendirian partai oleh pemimpin yang berkarisma menjadi hal penting yang menyebabkan personalisasi politik berlangsung di dalam partai.³² Pemimpin yang berkarisma selain mampu menjaga kontinuitas sejarah partai juga mampu memobilisasi suara bagi partai dalam pemilihan umum.³³ Dalam definisi Weber, karisma merujuk pada karunia seseorang yang terkait dengan pengabdian kepada kesucian, kepahlawanan, atau karakter teladan seseorang yang luar biasa, dan pola normatif atau perintah yang diturunkan atau ditahbiskan olehnya.³⁴ Seorang tokoh berkarisma akan mampu menarik perhatian publik, sekaligus menjadi tokoh yang didengar partai. Lambat laun tokoh karismatik ini akan menjadi identitas partai, seperti halnya yang terjadi di PAN dan PKB.³⁵

Gus Dur sebagai pendiri PKB dan Amien Rais sebagai pendiri PAN merupakan tokoh berkarisma yang kemudian menjadi tokoh sentral dan mampu mempersonalisasikan partainya. Gus Dur selain menjadi pendiri partai juga berkedudukan sebagai penarik massa setia bagi PKB. Gus Dur, sebagai keturunan Kiai NU, memiliki banyak pengikut dari kalangan Nahdliyin, sehingga ia menjadi penarik dukungan bagi PKB saat pemilu. Ia kemudian menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB yang dapat mempengaruhi seluruh kebijakan partai.³⁶ Ia, misalnya, menjadi penentu siapa yang menjadi ketua umum partai (Dewan Tanfidz). Penentuan posisi ketua umum pada akhirnya

lebih bergantung pada pertimbangan personal dan koneksi askriptif dan loyalitas pada patron daripada pertimbangan merit. Orang-orang yang loyal pada Gus Dur dapat mencapai posisi puncak dalam kepemimpinan partai dengan mudah dan cepat, seperti halnya yang terjadi pada Matori Abdul Djilil dan keponakannya Muhaimin Iskandar.³⁷

Situasi serupa PKB juga terjadi di PAN, dimana Amien Rais yang merupakan deklarator partai dan ketua umum pertama menjadi sangat berpengaruh bagi partai.³⁸ Amien Rais sebagai tokoh Muhammadiyah sekaligus pendiri partai secara tidak langsung telah merekatkan organisasi Islam ini dengan PAN. Karenanya, Amien menjadi penarik dukungan kuat bagi partai khususnya dari kalangan kader Muhammadiyah.³⁹ Amien menjadi tokoh yang sangat kuat di PAN, tak hanya saat ia menjadi ketua partai namun juga setelah ia melepaskan jabatan itu. Ia sangat berpengaruh dalam segala pembuatan kebijakan partai, termasuk ketika penentuan pemimpin PAN. Restu Amien menjadi yang menentukan dalam keterpilihan Ketua Umum PAN, baik itu pada keterpilihan Soetrisno Bachir untuk periode 2005-2010, Hatta Rajasa pada tahun 2010, maupun Zulkifli Hasan pada tahun 2015.⁴⁰

Personalisasi politik yang kuat pada PKB dan PAN cenderung tidak cukup terlihat pada PKS dan PPP. PKS tidak dibangun dengan figur elite yang personal dan berkharisma tetapi oleh basis kedisiplinan maupun ideologi

³² Menurut Panebianco dalam Biezen (2003), struktur genetik partai dinilai paling menentukan dalam perkembangan organisasi partai politik. Selanjutnya lihat: Ingrid van Biezen, *Political Parties in New Democracies Party Organization in Southern and East-Central Europe* (Hampshire and New York: Palgrave Macmillan, 2003), hlm. 16; Calise, "The Personal Party...", hlm. 301-315

³³ Olli Hellmann, *Political Parties and Electoral Strategy The Development of Party Organization in East Asia* (Hampshire and New York: Palgrave Macmillan, 2011), hlm. 126.

³⁴ Ulla Fionna, "The Trap of Pop-Charisma for the Institutionalization of Indonesia's Post-Suharto Parties," *Asian Journal of Political Science*, 2016.

³⁵ Robert Harmel and Lars Svasand, "Party Leadership and Party Institutionalisation: Three Phases of Development," *West European Politics*, 16, no. 2, (2007): 67-88.

³⁶ Firman Noor, *Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Awal Reformasi*, (Jakarta: LIPI Press, 2015).

³⁷ Kikue Hamayotsu, *The End of Political Islam? A Comparative Analysis of Religious Parties in the Muslim Democracy of Indonesia*, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 3 (2011): 133-159.

³⁸ "Menjaga Sinar Politik Sang Matahari," *Harian Kompas*, (Jakarta), 2 Maret 2015.

³⁹ Eunsook Jung, "Islamic Organizations and Electoral Politics in Indonesia: the Case of Muhammadiyah," *South East Asia Research*, 22, no. 1: 73-86.

⁴⁰ Bastian Nainggolan dan Yohan Wahyu, *Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016), hlm. 171; "Menjaga Sinar Politik Sang Matahari," *Harian Kompas*, (Jakarta), 2 Maret 2015. Lihat juga Sandra Amalia dan Ridho Imawan Hanafi, "Masa Depan PAN: Merawat Stabilitas Dukungan di Pemilu," dalam *Masa Depan Partai Islam di Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya*, ed. Moch. Nurhasim (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 129-131.

Tabel 3. Indikator Level Personalisasi Partai Politik di Era Reformasi

Indikator	PKB	PAN	PKS	PPP
<i>Image</i> tokoh	+ -	+ -	+ -	-
Dominasi terhadap kebijakan partai	+	+ -	-	-
<i>Vote getter</i> dalam pemilu	+ -	+ -	-	-
Ketergantungan pembiayaan partai	-	-	-	-

Keterangan:

++ : Sangat kuat + - : Sedang
 + : Kuat - : Lemah

organisasi.⁴¹ Terdapat struktur organisasi yang bisa menahan lebih jauh individu-individu elite partai agar tak mampu mempersonalkan partai. Meskipun ada juga spekulasi bahwa Hilmi Aminuddin berhasil menjadi tokoh yang sangat pengaruh bagi PKS pasca-Pemilu 2004.⁴² Di kalangan internal, Hilmi dinilai sebagai sosok yang *powerful*, tetapi dinamika organisasi pada akhirnya tetap berlangsung dinamis.⁴³ Absennya personalisasi partai juga berlangsung di PPP. Pada era reformasi ini, tak ada satu orang figur kuat yang mampu mendominasi partai dalam jangka waktu yang lama, apalagi menjadi patron atau *image* bagi PPP.⁴⁴ Ada banyak figur yang berpengaruh dalam partai namun tak cukup kuat untuk mampu mempersonalkan partai. Beragamnya elite internal itu ditambah dengan situasi partai yang belum sepenuhnya terlembaga justru memicu konflik internal antartokoh elite itu rentan terjadi.⁴⁵ Beberapa konflik internal PPP yang pernah terjadi di antaranya: konflik antara kubu Hamzah Haz dengan kubu Zainuddin MZ; konflik antara kubu Suryadharma Ali dan Romahurmuziy; serta konflik antara Romahurmuziy dengan Djan Faridz.

Berangkat dari pengalaman PKB, PAN, PKS dan PPP, terlihat bagaimana derajat pelebagaan partai menentukan terbentuk dan tidaknya personalisasi partai. Lemahnya pelebagaan partai membuka peluang besar bagi terbentuknya

partai personal yang menjalankan agenda dan kebijakan partai dengan berpusat pada figur karismatik. Dalam hal ini juga diperlihatkan dengan lemahnya manajemen organisasi seperti peraturan internal yang bisa dijadikan pijakan dalam beberapa keputusan penting partai, maupun dalam menangani perpecahan internal.⁴⁶ Perbedaan level pelembagaan partai ini yang menjadikan level personalisasi kemudian berbeda antarpolisi politik Islam. PKS yang mencoba disiplin dengan aturan dan ideologi partai, misalnya, cenderung terhindar pada personalisasi partai.

Terkait dengan personalisasi partai Islam di Indonesia era reformasi, maka penting dicatat bahwa *level* personalisasi partai Islam sejak 1999 hingga hari ini tidak bersifat stagnan dan mengalami pasang surut, khususnya pada PKB dan PAN. Tabel 3 menggambarkan kondisi personalisasi pada partai Islam saat ini. Informasi pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa PKB dan PAN hari ini tak lagi melekat secara sangat kuat atau kuat pada ketokohan individu. Perubahan ini terjadi setelah partai tak lagi dipimpin oleh Gus Dur (pada PKB) dan Amien Rais (pada PAN).

Sejak mundurnya Gus Dur dari tampuk kepemimpinan partai, personalisasi PKB cenderung melemah. Namun, personalisasi partai cenderung menguat kembali saat Muhaimin memegang kepemimpinan PKB. Hal ini ditandai oleh tersingkirnya kelompok atau faksi yang berseberangan dengan Muhaimin pada saat Muhaimin menjadi ketua partai. Artinya, Muhaimin berhasil membentuk faksi dominan di dalam tubuh PKB dan tampil sebagai orang yang cukup kuat di PKB, terutama setelah dirinya

⁴¹ Hamayotsu, "The End of Political...", hlm. 133-159.

⁴² Hamayotsu, "The End of Political...", hlm.133-159.

⁴³ Hamayotsu, "The End of Political...", hlm. 235.

⁴⁴ Firman Noor, "Leadership and Ideological Bond: PPP and Internal Fragmentation in Indonesia," *Studia Islamika*, 23, no. 1, (2016): 61-103.

⁴⁵ Firman Noor, "Leadership and Ideological Bond...", hlm. 61-103.

⁴⁶ Tan, "Indonesia Seven Years...", hlm. 88-114.

terpilih dalam Muktamar PKB di Surabaya, Jawa Timur, tahun 2014.⁴⁷

Pada PAN saat ini, pengaruh Amien Rais tidak lah sekuat dahulu seperti saat ia masih menjabat ketua umum. Restunya masih berpengaruh terhadap penentuan siapa calon ketua umum partai, namun ia tidak lagi bersifat sangat menentukan bagi seluruh kebijakan partai seperti dahulu.⁴⁸ Melemahnya personalisasi partai ini dipengaruhi oleh ketegasan partai untuk menerapkan pembatasan periode kepemimpinan.⁴⁹ Di tubuh PAN, adanya kesepakatan tak tertulis di internal partai bahwa jabatan ketua umum hanya untuk satu periode cukup mampu meredam munculnya tokoh elite yang dominan dalam periode lama di dalam partai.

Kondisi partai Islam yang saat ini cenderung minimal terpersonalisasi dipengaruhi juga oleh tidak bergantungnya pendanaan partai pada tokoh sentral partai. PKS misalnya, lebih mengandalkan sumbangan dari para anggota atau internal kader mereka dan elite mereka yang duduk dalam eksekutif atau legislatif.⁵⁰ Hal ini juga terjadi dengan partai-partai Islam lain. Mereka lebih mengandalkan penerimaan dana partai dari iuran anggota mereka (termasuk oleh anggota partai yang menjadi bagian dari lembaga eksekutif dan menjadi anggota parlemen), sumbangan yang dipersyaratkan sesuai regulasi, serta bantuan dari negara.

Partai Nasionalis dan Personalisasi

Politik

Pada era reformasi, berbagai partai nasionalis muncul lekat dengan *image* para elite yang mendirikan atau menggagasnya. Hal ini seperti terlihat pada Megawati di PDIP, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Partai Demokrat, Prabowo Subianto di Gerindra, Wiranto di Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Surya Paloh di Partai

Nasional Demokrat (Nasdem). Mereka tidak hanya menjadi pendiri partai, tetapi juga menjadi sosok yang memimpin partai, pengumpul suara dalam pemilu, calon presiden partai, hingga aktor di balik semua kebijakan penting partai. Personalisasi partai jelas nampak menjadi fenomena yang menggejala di tubuh partai nasionalis.

Dibandingkan dengan partai Islam, personalisasi partai nasionalis dapat dikategorikan memiliki kecenderungan personalisasi partai yang lebih kuat pada beberapa partainya. Hal ini diukur dari empat indikator yakni bagaimana tokoh menjadi *image* partai, dominasi tokoh sentral, individu elite sebagai *vote getter* partai dan ketergantungan pada tokoh dalam pendanaan partai. Seperti terurai di dalam tabel 4, partai nasionalis menunjukkan beberapa indikator di antaranya dalam level kuat dan sangat kuat. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa partai PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra dapat dikategorikan partai dengan personalisasi kuat. Sementara, Partai Nasdem memiliki kecenderungan personalisasi kuat tetapi belum dapat disimpulkan secara utuh karena usia partai yang masih sangat muda. Sementara, Partai Hanura terkategori sedang, meski pada perkembangan terakhirnya belum bisa diprediksikan karena ada suksesi kepemimpinan dari Wiranto ke Oesman Sapta Odang (OSO). Partai Golkar terkategori personalisasi lemah karena kecenderungan yang terjadi pada partai Golkar bukanlah personalisasi melainkan oligarki. Hal yang menjadi catatan penting dalam kasus personalisasi partai nasionalis adalah pola personalisasi yang cenderung bersifat stagnan, atau tidak terlihat dinamika perubahan yang signifikan selama era reformasi seperti berlangsung pada PKB dan PAN yang personalisasinya cenderung melemah.

⁴⁷ "Muhaimin Terpilih Aklamasi Pimpin PKB," *Harian Kompas* (Jakarta), 2 September 2014.

⁴⁸ Hellmann, *Political Parties and Electoral*, hlm.127-128.

⁴⁹ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAN.

⁵⁰ Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariah* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm. 152-153.

Tabel 4. Indikator Level Personalisasi Partai Politik di Era Reformasi

Indikator	PDIP	Golkar	Demokrat	Gerindra	Nasdem	Hanura
Image tokoh	++	-	++	++	++	+ -
Dominasi terhadap kebijakan partai	++	+ -	++	++	++	+ -
Vote getter dalam pemilu	++	-	++	++	-	-
Ketergantungan pembiayaan partai	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -

Keterangan:

++ : Sangat kuat + - : Sedang
 + : Kuat - : Lemah

Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu berlangsungnya personalisasi partai nasionalis, di antaranya sejarah pendirian partai, karisma tokoh, hubungan patronase, dan sumber pendanaan partai. Tokoh sentral yang mempersonalisasikan partai nasionalis umumnya adalah pendiri partai yang kemudian ditetapkan sebagai ketua umum atau menempati jabatan struktural strategis lainnya (lihat tabel 1). Misalnya, Megawati yang mendirikan PDIP, SBY yang menggagas PD, Prabowo yang mendirikan Partai Gerindra, Wiranto yang membentuk Partai Hanura dan Surya Paloh sebagai pendiri Partai Nasdem. Hampir dari semua nama-nama pendiri-pendiri partai tersebut adalah juga ketua umum partai. Yang menarik, selain menjadi pendiri partai, mereka juga merupakan kandidat presiden dalam pemilu yang biasanya terpilih secara aklamasi oleh partai. Hal ini karena partai didirikan oleh para elite politik untuk dijadikan sebagai media kandidasi mereka dalam pemilu. PD, Partai Gerindra, Hanura dan Nasdem adalah partai-partai dengan motif pendiriannya untuk mengusung para tokoh sentral dalam pilpres.

Selain itu, karisma yang dimiliki oleh para tokoh sentral menjadi salah satu latar belakang mengapa personalisasi politik pada partai terjadi. Kepemimpinan karismatik diklaim dimiliki oleh masing-masing ketua umum partai politik, diantaranya termasuk Megawati, SBY, dan Prabowo. Bagi para kader, para pemimpin partai tersebut memiliki karisma yang kuat sehingga akhirnya terbentuk fanatisme atas kepemimpinan mereka. Sebagai contoh, bagi kader Partai Demokrat, SBY adalah pimpinan berkarisma yang menjadi teladan dalam berdemokrasi.

SBY juga dianggap sebagai tokoh yang dapat memimpin dan menyatukan Partai Demokrat. Hal ini terlihat saat Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hingga akhirnya menjadi tersangka korupsi, Partai Demokrat terancam perpecahan internal. Namun, SBY berhasil mengambil alih kepemimpinan dan menjadikan partai tetap utuh dan berfungsi. Hal yang sama terjadi juga di PDIP, dimana Megawati diyakini kuat oleh kadernya sebagai pemimpin partai yang berkarisma dan merupakan penyebab partai tetap solid. Hal ini irasional, namun terjadi.

Aspek penting lainnya yang melatarbelakangi personalisasi partai adalah sumber pendanaan partai. Besarnya kebutuhan dan biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan partai menyebabkan partai harus mencari berbagai sumber pendanaan. Pada partai nasionalis, tokoh sentral partai memegang pengaruh penting posisi penting sebagai sumber pendanaan partai. Hal ini pulalah yang menyebabkan partai menjadi sangat bergantung pada individu elite tersebut. Kultur patronase pun menjadi penjelas lain mengapa tokoh sentral dapat menguasai partai, yakni karena ia memainkan peran sebagai patron dari para anggota partainya. Hal ini memberi ruang bagi tokoh partai untuk melanggengkan kekuasaannya atas partai, dan pada akhirnya menguatkan personalisasi partai.

Kasus bagaimana pengaruh sumber pendanaan oleh tokoh sentral terhadap personalisasi terlihat cukup kentara pada Partai Gerindra dan Nasdem. Prabowo pada Gerindra dan Surya Paloh pada Nasdem merupakan sumber finansial terbesar bagi partai, walau tak dipungkiri ada sumber lain seperti sumbangan

dan iuran anggota partai. Berbeda dengan Partai Gerindra dan Nasdem, pendanaan Partai Hanura tidak sepenuhnya bersumber dari Wiranto. Namun, pendaan partai dipikul oleh Wiranto dengan memanfaatkan jaringan sosialnya; baru setelah, OSO menjadi pemimpin baru Partai Hanura, maka banyak alokasi finansial untuk kebutuhan partai bersumber dari ketua partai. Pada Partai Golkar, seorang figur dapat menjadi yang paling berpengaruh di dalam partai tidak hanya karena ia mendanai segala kebutuhan partai, tetapi juga karena mampu memenangkan “munas” atau suksesi kepemimpinan di internal partai Golkar berkat seluruh modal kapital (termasuk finansial) yang ia miliki.⁵¹ Berbeda dengan partai nasionalis lainnya, Partai Demokrat dan PDIP cenderung tidak bergantung secara penuh pada tokoh sentral, melainkan secara bersama dibebankan pada pengurus dan anggota partai, yang terutama telah memegang tampuk kekuasaan di pemerintahan atau di lembaga legislatif.

Dampak Personalisasi Partai Terhadap Pelembagaan Partai Politik dan Demokrasi

Personalisasi politik pada partai, sebagai sebuah proses individualisasi yang memengaruhi seluruh proses kerja di dalam partai politik,⁵² akan berdampak kepada internal sekaligus eksternal partai. Adapun dampak internal yang disebabkan dapat menguntungkan di satu sisi dan merugikan di sisi lainnya. Dampak menguntungkan tersebut di antaranya adalah: (1) menghindari konflik internal partai; (2) stabilitas internal partai; (3) memperpendek rentang kendali partai; (4) memperpanjang usia partai--dengan adanya tokoh yang kuat, partai bisa lolos pemilu dan memperoleh dukungan politik; dan (5) pada tahap akhirnya akan tercipta kohesi

⁵¹ Meutya Hafid dalam FGD “Personalisasi Partai Politik Era Reformasi, yang diadakan oleh P2P-LIPI di Jakarta, 28 Agustus 2017.

⁵² Pengertian ini diadopsi dari pengertian personalisasi politik yang dikemukakan oleh Bauman, 2001 di mana personalisasi politik diartikan sebagai bagian dari proses secara menyeluruh dari proses individualisasi kehidupan sosial. Dalam konteks ini personalisasi partai dapat dimaknai sebagai gejala adanya proses individualisasi di dalam partai politik.

partai. Sayangnya, dampak-dampak positif ini hanya bersifat semu atau sementara.

Jika dikaitkan dengan perkembangan partai politik yang disebut oleh Harmel dan Svásand, maka pada tahap awal perkembangan partai, figur yang kuat dan kokoh memang diperlukan untuk membangun partai. Apalagi bagi pola kepartaian di Indonesia yang bersifat *catch all parties*, dan bukan partai kader. Oleh karena hadirnya tokoh sentral membawa dampak positif sebagai pembeda antar partai dan penting bagi perkembangan partai. Namun, hal ini hanya bersifat semu dan sementara saja. Dalam jangka panjang, kehadiran figur itu dapat menimbulkan ketergantungan partai yang sangat kuat terhadap tokoh sentral tersebut.

Pada partai yang proses pendiriannya bergantung pada sesosok tokoh/individu dan keluarga, disertai juga dengan adanya ketergantungan pendanaan partai, maka kepemilikan partai menjadi mengarah pada individu, keluarga atau korporasi. Ketergantungan ini menyebabkan dampak negatif, karena partai bukan saja “dikooptasi,” tetapi bekerja atau tidaknya organisasi partai juga bergantung dari kekuatan ekonomi dan finansial yang memimpinnya. Pola kepemimpinan partai yang menonjolkan pada ketokohan satu individu elite ini akan merugikan partai karena menyebabkan de-institusionalisasi partai politik. Kelembagaan partai politik tergerus karena hampir pasti organisasi dan manajemen partai tak berjalan baik.

Selain itu, partai juga rentan mengalami pembelokan ideologis. Pembelokan ideologis ini terjadi karena yang kemudian berhak menafsirkan ideologi partai adalah hanya tokoh sentral dan lingkarannya, sementara kader-kader partai yang mungkin potensial—tidak dapat berkontribusi bagi perkembangan ideologi partai. Akibatnya, monopoli identitas partai pun terjadi karena ideologi partai dianggap sebagai “warisan” para tokoh sentral, hingga hanya mereka yang berhak menafsirkan dan meneruskannya. Dampak lebih buruknya adalah adanya kematian ideologi partai karena partai digerakan oleh kekuatan figur/orang dan bukan oleh kekuatan ide atau gagasan.

Tidak hanya berdampak pada internal partai politik, personalisasi partai juga dapat

menimbulkan efek pada politisasi sistem politik dan memengaruhi kualitas jalannya pemerintahan. Politisasi sistem politik, dalam hal ini, diartikan sebagai suatu kondisi ketika kepentingan individu, pemimpin, keluarga, kerabat, dan korporasi mendominasi dan menguasai proses-proses kandidasi jabatan-jabatan publik secara luas dalam tubuh eksekutif dan legislatif, serta jabatan-jabatan strategis lainnya. Salah satu bentuk dari politisasi politik ini adalah dinasti politik. Dinasti politik di Indonesia saat ini menguat tak hanya di partai tetapi juga di jabatan-jabatan publik yang dipilih melalui pemilu maupun tidak. Yang masuk di dalam dinasti politik ini umumnya mereka yang menjadi elite partai, khususnya yang ada dalam lingkaran tokoh sentral partai. Tak dimungkiri, hal ini kemudian memengaruhi kualitas pemerintahan yang cenderung berbasis pada kepentingan elite, bukan lagi publik.

Salah satu aspek terdampak dari personalisasi partai adalah konsolidasi demokrasi di Indonesia. Sebelum lebih jauh membahas demokrasi Indonesia, personalisasi partai jelas akan menjadi pembahambat terwujudnya demokratisasi internal partai. Pembuatan kebijakan partai yang condong diputuskan atau dipengaruhi secara kuat oleh kehendak dan kepentingan elite partai menandakan mekanisme demokrasi tidak dijalankan partai. Yang menarik, hal ini justru diperkuat dengan Undang-Undang, dimana pengaturan tentang pengajuan kandidasi politik, terutama legislatif, mengharuskan keputusan partai ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal (sekjen) partai. Jika demokrasi internal partai saja telah dirusak oleh kehadiran personalisasi partai, maka tentunya demokrasi dalam konteks luas pun terhambat oleh adanya jeratan personalisasi ini.

Penutup

Partai politik sudah seharusnya menjadi insitusi demokratis yang mampu bersifat akuntabel, terutama mengingat perannya yang penting sebagai satu-satunya wadah resmi rekrutmen politik dan seleksi pejabat publik. Namun yang amat disayangkan, partai secara internal justru mengalami kesulitan dalam menjalankan sirkulasi

kepemimpinan partai mereka sendiri. Hal ini menjadikan banyak partai politik kemudian terjebak dalam personalisasi politik. Hampir seluruh partai di Indonesia yang berkedudukan di parlemen selama era reformasi ini dipengaruhi secara kuat oleh figur atau sosok tokoh sentral. Tokoh sentral telah menjadi identitas partai, sekaligus menjadi yang paling menentukan bagi partai dalam waktu yang cukup lama.

Faktor penyebab dan yang memfasilitasi terbentuknya personalisasi partai ini tidaklah tunggal, melainkan banyak faktor yang saling berkelit dan kelindan. Secara umum, ada dua bentuk faktor yang menjadi pendorong terjadinya personalisasi politik pada partai: faktor eksternal-institusional dan internal-noninstitusional. Faktor-faktor institusional itu di antaranya adalah pilihan terhadap sistem demokrasi presidensial berikut konsekuensi dan implikasi kelembagaannya, dan pilihan terhadap sistem pemilu, baik sistem pemilu legislatif dan sistem pemilu presiden maupun sistem pemilihan kepala daerah (pilkada), serta sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia.

Tidak hanya faktor eksternal-institusional yang memfasilitasi terciptanya personalisasi, faktor internal-noninstitusional yang berhubungan dengan kultur dan tradisi berpartai juga turut mempengaruhi personalisasi partai. Sejarah pendirian partai, kepemimpinan karismatik, kultur patronase, serta kebergantungan pada sumber pendanaan partai saling tumpang tindih membentuk kultur dan tradisi politik yang menciptakan personalisasi partai. Dari beragam hal itu, faktor ketokohan di dalam partai menjadi kunci persoalan personalisasi politik pada partai. Partai yang pembentukannya dipengaruhi secara kuat oleh sosok tokoh menjadi partai ditempa sebagai kendaraan politik untuk kepentingan individu, bukan publik. Partai ditempatkan sebagai media untuk meraih kekuasaan politik, maupun dalam memperoleh kompensasi ekonomi dari dukungan politik yang diberikan terhadap mereka yang memiliki otoritas politik. Akibat logisnya, konstruksi relasi internal partai menjadi tidak setara karena pemimpin cenderung menjadi patron dan anggota partai sebagai pengikutnya. Pemimpin dalam hal ini diposisikan sebagai pihak

yang berkuasa dan yang “tak pernah salah.” Hal ini menjadi semakin buruk ketika proses sukses kepemimpinan tidak berjalan atau pola seleksinya didominasi oleh otoritas elite atau pimpinan partai. Berbagai hal ini kemudian membentuk simpul yang memfasilitasi terlembaganya personalisasi politik di dalam parpol.

Personalisasi politik pada partai sesungguhnya tidak dapat dipandang hanya sebagai problem yang berdampak negatif, namun juga dapat berdampak positif. Dampak positif tersebut diantaranya adalah mampu menghindarkan partai dari konflik internal partai, memberikan stabilitas partai, memperpendek rentang kendali partai, memperpanjang usia partai, serta menciptakan kohesi partai. Namun demikian, dampak positif itu hanya bersifat semu dan sementara. Dampak negatif dirasa masih menjadi ancaman yang lebih besar bagi berlangsungnya personalisasi politik pada partai. Ketergantungan partai terhadap tokoh sentral mampu berakibat pada terkooptasinya partai oleh kepentingan individu, bukan kepentingan publik yang seharusnya diutamakan partai. Hal ini menandakan juga semakin terkikisnya partai secara kelembagaan dan memperlihatkan tidak berfungsinya institusi partai. Tidak hanya itu, personalisasi partai juga berdampak buruk terhadap upaya penegakan demokrasi, baik itu untuk internal partai maupun untuk kehidupan politik yang lebih luas.

Daftar Pustaka

Buku

- Adian, Donny Gahril. “Personalisasi Politik.” *Harian Kompas*. (Jakarta), 27 September 2012.
- Ahmad, Ikhsan. *Pilar Demokrasi Kelima: Politik Uang: Realitas Konstruksi Politik Uang di Kota Serang, Banten*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Amalia, Luky Sandra dan Ridho Imawan Hanafi. “Masa Depan PAN: Merawat Stabilitas Dukungan di Pemilu,” dalam Moch. Nurhasim, *Masa Depan Partai Islam di Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Amir, Zainal Abidin. *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES, 2003.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAN
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP.
- Azra, Azyumardi. *Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamic in a Global Context*. Jakarta: Soltice Publishing, 2006.
- Van Biezen, Ingrid. *Political Parties in New Democracies Party Organization in Southern and East-Central Europe*. Hampshire and New York: Palgrave Macmillan, 2003.
- Blondel, Jean, Jean-Louis Thiebault, et.al. *Political Leadership, Parties and Citizens: The Personalisation of Leadership*. Oxon, UK: Routledge, 2010.
- Cross, William dan Jean-Benoit Pilet. *The Politics of Party Leadership: A Cross National Perspective*, Oxford, UK: Oxford University Press, 2015.
- Fatah, Eep Saefulloh. *Mencintai Indonesia dengan Amal*. Jakarta: Penerbit Republika, 2004.
- Firmanzah. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Hellmann, Olli. *Political Parties and Electoral Strategy The Development of Party Organization in East Asia*. Hampshire and New York: Palgrave Macmillan, 2011.
- Karvonen, Lauri. *The Personalization of Politics: A Study of Parliamentary Democracies*. Colchester, UK: ECPR Press, 2010.
- Mainwaring, S. & T. R. Scully. *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1995.
- Manning, Chris, dan Peter Van Diermen (eds.). *Indonesia di Tengah Transisi: Aspek-Aspek Sosial dari Reformasi dan Krisis*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2000.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Nainggolan, Bastian dan Yohan Wahyu. *Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016.
- Noor, Firman. “Menimbang Masa Depan Sistem Presidensial di Indonesia Problematika Demokrasi dan Kebutuhan Perbaikan Sistemik.” Dalam Moch. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti (ed). *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Noor, Firman. *Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Awal Reformasi*. Jakarta: LIPI Press, 2015.

- Pilet, Jean-Benoit dan William Cross. "Uncovering The Politics of Party Leadership." Dalam *The Politics of Party Leadership: A Cross National Perspective*, ed. oleh William Cross dan Jean-Benoit Pilet. Oxford, UK: Oxford University Press, 2015.
- Poguntke, T. dan P. P. Webb. *The Presidentialization of Politics: A Comparative Study of Modern Democracies*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Prasojo, Eko. "Pemilihan Presiden, Personalisasi Politik?" *Harian Kompas*. (Jakarta). 20 April 2004.
- Prasojo, Eko. *Demokrasi di Negeri Mimpi*. Depok: FISIP UI, 2005.
- Razuni, Ganjar. *Sebuah Koreksi Konstruksi Reformasi Hasil Pemilu 1999*. Jakarta: Labsospol FISIP UNAS, 2001.
- Renwick, Alan, dan Jean-Benoit Pilet. *Faces on the Ballot: The Personalization of Electoral Systems in Europe*. Oxford, UK: Oxford University Press, 2016.
- Rhodes, R. A. W., dan Paul T Hart. *The Oxford Handbook of Political Leadership*. Oxford, UK: Oxford University Press, 2014.
- Sandri, Giulia, Antonella Seddone, dan Fulvio Venturino, "Understanding Leadership Profile Renewal." Dalam *The Politics of Party Leadership: A Cross National Perspective*, diedit oleh William Cross dan Jean-Benoit Pilet, 144-171. Oxford, UK: Oxford University Press, 2015.
- Sartori, Giovanni. *Parties and Party Systems*. Colchester, UK: The European Consortium for Political Research (ECPR), 2005.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Yongnian, Zheng. *The Chinese Communist Party as Organizational Emperor*. Oxon OX: Routledge, 2010.
- Yudha, Hanta. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010.
- Jurnal**
- Ansell, Christopher K dan M. Steven Fish. 1999. "The Art of Being Indispensable Noncharismatic Personalism in Contemporary Political Parties", dalam *Comparative Political Studies* Vol. 32, No. 3.
- Calise, Mauro "The Personal Party: An Analytical Framework." *Scienze Politica*, 45, no.3, (2015).
- Fionna, Ulla. "The Trap of Pop-Charisma for the Institutionalization of Indonesia's Post-Suharto Parties." *Asian Journal of Political Science*, (2016).
- Gunther, Richard dan Larry Diamond. "Species of Political Parties," dalam *Party Politics*, 9, no. 2 (2003): 167-199.
- Hamayotsu, Kikue. "The End of Political Islam? A Comparative Analysis of Religious Parties in the Muslim Democracy of Indonesia." *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, no. 3, (2011).
- Harmel, Robert and Lars Svasand. "Party Leadership and Party Institutionalisation: Three Phases of Development." *West European Politics*, vo. 16, no. 2, (2007): 67-88.
- Johnson Tan, Paige. "Indonesia Seven Years after Soeharto: Party System Institutionalization in a New Democracy." *Contemporary Southeast Asia*, vol. 28, no. 1, (2006): 88-114.
- Jung, Eunsook. "Islamic Organizations and Electoral Politics in Indonesia: the Case of Muhammadiyah." *South East Asia Research*, vol. 22, no. 1, 73-86.
- Kitschelt, Herbert. "Formation of Party Cleavages in Post-Communist Democracies: Theoretical Propositions." *Party Politics*, vol. 1, (1995).
- Linz, Juan J. *Democracy: Presidential or Parliamentary: Does it Make a Difference*. makalah tidak dipublikasikan, 1985.
- Linz, Juan J. "The Perils of Presidentialism" *Journal of Democracy*, vol. 1, no. 1 (1990).
- Noor, Firman. "Leadership and Ideological Bond: PPP and Internal Fragmentation in Indonesia." *Studia Islamika*, vol. 23, no. 1, (2016.)
- Nurhasim, M. "Kegagalan Modernisasi Partai Politik di Era Reformasi." *Jurnal Penelitian Politik* 10, no. 1 (2013): 17-28.
- Samuels, David J. "Presidentialized Parties: The Separation of Powers and Party Organization and Behavior." *Comparative Political Studies* 35, no. 4, (2002): 461-483.
- Scott, James. "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia." *The American Political Science Review* 66, no. 1, (1972): 91-113.
- Sumber Cetak dan Online**
- Asril, Sabrina. "Demokrat: SBY Ditonjolkan karena Paling Aman." *Kompas Online*. 21 Maret 2014 dalam <http://nasional.kompas.com/read/2014/03/21/0710042/index>.

- Croissant, Aurel, dan Wolfgang Merkel. "Political Party Formation in Presidential and Parliamentary System" dalam <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/philippinen/50072.pdf>.
- Haris, Syamsuddin. "Partai dan Personalisasi Kekuasaan." *Harian Kompas*. 31 Maret, 2005.
- Hasan, Halili. "Partai Politik, Ornamen Demokrasi." *Jawa Pos*. 19 April 2016.
- Hayati, Istiqomatul. "Sihir Amien Rais Bikin PAN Hitam Putih." *Tempo Online*. 3 Maret 2015. dalam <https://nasional.tempo.co/read/646568/sihir-amien-rais-bikin-pan-hitam-putih>.
- CNN. "Ketua Umum Tetap Mega, PDIP: Kepemimpinan Dibawa Sejak Lahir." 4 April 2017 dalam <http://m.cnnindonesia.com/politik/2015043025358-32-43988/ketua-umum-tetap-mega-pdip-kepemimpinan-dibawa-sejak-lahir/>.
- Kompas. "Masuknya Agus Harimurti Yudhoyono Dinilai Persiapan SBY Regenerasi di Demokrat." 23 September 2016 dalam <http://nasional.kompas.com/amp/read/2016/09/23/09252571/masuknya.agus.harimurti.yudhoyono.dinilai.persiapan.sby.regenerasi.di.demokrat.?client=safari>.
- Redaksi. "Menjaga Sinar Politik Sang Matahari." *Harian Kompas*. 2 Maret 2015.
- Redaksi. "Muhaimin Terpilih Aklamasi Pimpin PKB." *Harian Kompas*. 2 September 2014.
- Redaksi. "Pengaruh Amien Rais di PAN Masih Sangat Besar." 19 Desember 2014 dalam <http://m.detik.com/news/berita/2782283/pengaruh-amien-rais-di-pan-masih-sangat-besar>.
- Tolleng, A. Rahman. "Selamat Datang Personalisasi Politik." *Harian Tempo*. 24 November 2003.
- Tribun Pontianak. "Amien Rais: Voting Lebih Bagus Daripada Aklamasi." dalam [https://amp/pontianak.tribunnews.com/amp/2015/03/01/amien-rais-voting-lebih-bagus-daripada-aklamasi?client=safari](https://amp.pontianak.tribunnews.com/amp/2015/03/01/amien-rais-voting-lebih-bagus-daripada-aklamasi?client=safari).
- "Makna Angka 6 bagi Gerindra." dalam <http://partaigerindra.or.id/2013/01/14/makna-angka-6-bagi-gerindra.html>.
- "Sejarah Pembentukan dan Berdirinya Partai Demokrat." dalam <http://www.demokrat.or.id/sejarah/>.

Wawancara dan FGD

- FGD "Personalisasi Partai Politik Pasca Reformasi" yang diselenggarakan oleh P2P-LIPI, 28 Agustus 2017.
- Wawancara dengan kader PDIP Jawa Timur (tidak dapat disebutkan namanya) pada Juni 2016 di Surabaya.
- Wawancara dengan Prof. Purwo Santoso, di UGM, Yogyakarta, Hari Rabu, 17 Mei 2017.

TENTANG PENULIS

Aisah Putri Budiatri

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui aisahputrib@gmail.com.

Agus Sutisna

Penulis merupakan dosen di FISIP Universitas Muhamadiyah Tangerang. Menyelesaikan pendidikan doctoral di Universitas Nasional, Jakarta. Saat ini penulis menjadi anggota KPU Provinsi Banten periode 2018-2023. Aktif menulis tentang kepemiluan dan demokrasi di berbagai jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: tisna_1965@ymail.com.

Firman Noor

Penulis merupakan peneliti senior sekaligus professor riset pada Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Indonesia, S2 di Australian National University dan S3 di Universitas Exeter, Inggris. Karya-karya akademisnya banyak diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional maupun buku terkait kepemiluan dan partai politik. Penulis dapat dihubungi melalui Email: firman.noor@yahoo.co.id.

Idil Akbar

Penulis merupakan dosen di FISIP Universitas Padjajaran, Bandung. Menyelesaikan pendidikan master Ilmu Politik di FISIP Universitas

Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: idil.akbar@gmail.com

Kurniawati Hastuti Dewi

Penulis adalah peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2007 menyelesaikan program master dari Faculty of Asian Studies Australian National University dan mendapat gelar doktor dari Kyoto University Jepang tahun 2012. Memiliki passion dalam bidang gender dan politik, kepemimpinan perempuan, gender dan desentralisasi, hak-hak asasi perempuan dan anak serta gender, Islam dan demokrasi di Indonesia. Berbagai tulisan akademis telah diterbitkan dalam jurnal nasional, internasional dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: kurniawati.dewi@yahoo.com.

Lili Romli

Penulis merupakan peneliti senior dan professor riset di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan doctoral ilmu politik di FISIP Universitas Indonesia. Kajian yang diminati penulis adalah tentang kepemiluan dan partai politik. Penulis dapat dihubungi melalui: email: liliromli.lipi@gmail.com

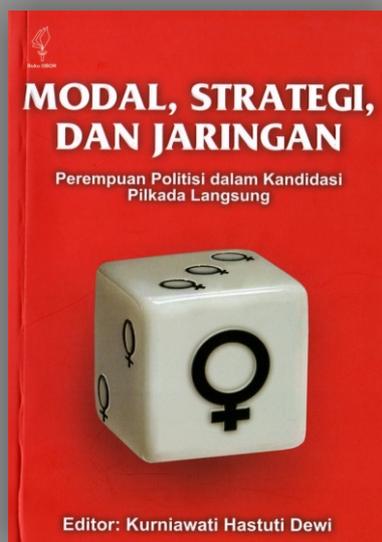
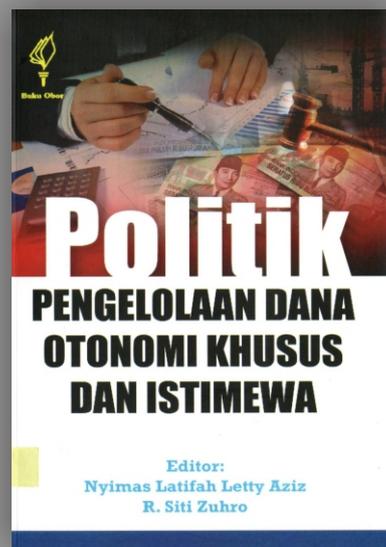
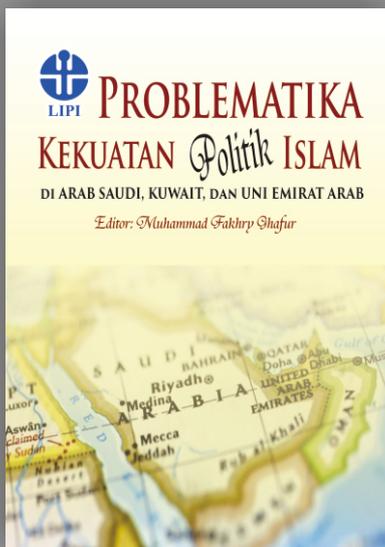
M. Fajar Shodiq Ramadhan

Penulis merupakan pengajar pada Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Brawijaya. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Airlangga, Surabaya. Beberapa karya tulisnya tentang kepemiluan telah dimuat dalam berbagai jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui email: fajarramadhan@ub.ac.id.

Moch Nurhasim

Adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pendidikan S2 diselesaikan di Universitas

Informasi Hasil Penelitian Terpilih



Indonesia. Berbagai kajian seputar kepemiluan, partai politik, parlemen dan pilkada telah dihasilkan dalam bentuk jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: hasim_nur@yahoo.com.

Mouliza K.D Sweinstani

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 2018. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro dan S2 di Universitas Indonesia. Sebelumnya bekerja di Bawaslu RI. Kajian yang diminati penulis antara lain: gender dan politik dan kepemiluan. Penulis dapat dihubungi melalui email: moulizadonna@gmail.com.

Romel Masykuri

Penulis merupakan mahasiswa program magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga. Dapat dihubungi melalui email: romel.masykuri@gmail.com

Ridho Imawan Hanafi

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Menyelesaikan S1 Jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya. Melanjutkan S2 di Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia. Sebelum di LIPI, penulis bekerja sebagai peneliti di Soegeng Sarjadi Syndicate, Jakarta (2008-2014). Kajian yang diminati adalah demokrasi, partai politik, dan pemilu. Penulis dapat dihubungi melalui surel ridhoimawan@gmail.com.

Sri Budi Eko Wardani

Penulis adalah pengajar di departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia. Penulis menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3 di Universitas Indonesia. Pernah menjadi Direktur Eksekutif Puskapol UI. Kajian peminatan penulis adalah tentang kepemiluan, perempuan dan perwakilan politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: sbe_wardani@yahoo.com.

Sri Yanuarti

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana Ilmu Politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru diterbitkan antara lain: *Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia*, *Tentara yang Gelisah*, *Tentara Mendamba Mitra*, *Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru*, *Beranda Perdamaian*, *Problematika Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua)*, *Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan*, *Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003- 2004*, dan *Hubungan Sipil Militer Era Megawati*. Kajian kepolisian di antaranya: *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal*; *Evaluasi Reformasi Polri dan lain- lain*. Selain kajian tentang pertahanan dan keamanan, Sri Yanuarti juga aktif menulis kajian tentang konflik antara lain: *Konflik di Maluku & Maluku Utara: Strategi Penyelesaian Konflik Jangka Panjang*, *Capacity Building: Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku*; *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*; *Kerangka Pencegahan Konflik Komunal di Indonesia*, dan lain-lain. Ia dapat dihubungi melalui surel yanuc2000@yahoo.com.